

Pola Dan Peta Kemampuan Keuangan Desa Setelah Penerbitan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

I Putu Fery Karyada¹

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata
Universitas Hindu Indonesia, Indonesia
Email: karyada_fery@yahoo.com

Putu Cita Ayu²

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata
Universitas Hindu Indonesia, Indonesia

I Gede Aryana Mahayasa²

Fakultas Ekonomi Bisnis dan Pariwisata
Universitas Hindu Indonesia, Indonesia

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji fenomena terkait dampak dana desa terhadap pola hubungan dan juga kemampuan keuangan desa. Analisis pola hubungan untuk mengetahui tingkat kemandirian desa, sedangkan analisis kemampuan keuangan desa untuk mengetahui kemampuan desa dalam memenuhi kebutuhannya. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif pendekatan kuantitatif menggunakan tabel dan grafik. Obyek analisis adalah Laporan Realisasi APBDes dari tahun 2016 sampai dengan 2018. Sampel penelitian yaitu Kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar dan Klungkung. Hasil Penelitian menyatakan seluruh desa di kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar dan Klungkung mendapatkan nilai rasio kemandirian kurang dari 25 point sehingga berada pada kategori pola instruktif. Analisis *Growth* dan *Share*, memperoleh 1 desa berada pada kuadran I, 3 desa berada pada kuadran II, 5 desa pada kuadran III dan 282 desa di kuadran IV.

Kata Kunci: Pola Hubungan; Kemampuan Keuangan; Dana Desa; Desa.

Pattern And Mapping The Village Financial Ability After Implementation Law Number 6 Of 2014 On Village

ABSTRACT

This study examines the impact of Dana Desa on village relations and financial ability. The relation is determined by village independence, whereas the financial ability to know village capability in their need. The method is descriptive using tables and graphs. Object analysis is APBdes from 2016 to 2018. Samples are Jembrana, Tabanan, Gianyar and Klungkung regency. Based on the result, all villages in Jembrana, Tabanan, Gianyar, and Klungkung have a ratio of fewer than 25 points so in the instructive category. Growth and Share analysis get 1 village in quadrant I, 3 villages in quadrant II, 5 villages in quadrant III and 282 villages in quadrant IV.

Keywords: Pattern; Financial Ability; Dana Desa; Village.



E-JA
e-Jurnal Akuntansi
e-ISSN 2302-8556

Vol. 30 No. 3
Denpasar, Maret 2020
Hal. 760-772

Artikel Masuk:
13 November 2019

Tanggal Diterima:
5 Maret 2020

PENDAHULUAN

Lahirnya konsep otonomi daerah sampai saat ini ternyata masih belum dirasakan oleh lapisan masyarakat terbawah yaitu tingkat desa. Salah satu penyebab tidak maksimalnya manfaat otonomi daerah bagi desa adalah fokus kebijakan terhenti di tingkat Kabupaten. Selain itu, lemahnya kapasitas demokrasi menyebabkan lemahnya kualitas pemerintahannya (Widodo, 2017). Pada Bulan September 2014 rasio Gini di pedesaan hampir menyentuh angka tertinggi yaitu sebesar 0,336 Badan Pusat Statistik, (2017) yang berarti masih terjadinya kesenjangan ekonomi yang cukup tinggi di wilayah pedesaan. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa yang sekarang dikenal dengan nama UU Desa.

UU Desa digunakan sebagai pedoman membentuk desa yang mandiri secara politik dan ekonomi yang memiliki landasan sosial, budaya dan kearifan lokal yang kuat. Peraturan tersebut memberikan tambahan akses pendanaan yang sangat besar kepada desa. Berdasarkan Nota Keuangan RI Tahun anggaran 2018 Kementerian Keuangan, (2018), jumlah transfer dana desa mencapai 60 triliun dengan rata-rata setiap desa mendapat dana sebesar 800 juta setiap tahunnya. Banyaknya dana yang diberikan kepada desa tentunya harus dikelola secara maksimal agar dapat langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Namun berdasarkan hasil evaluasi penggunaan dana desa di Bali, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan salah satunya adalah dana desa terkesan menimbulkan ketergantungan baru karena belum digunakan untuk kegiatan yang dapat menopang perekonomian masyarakat serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

Penetapan peraturan dana desa, tentunya dapat mengakibatkan perubahan terhadap kemandirian dan kemampuan keuangan desa. Konsekuensi diberlakukannya otonomi yaitu daerah otonom harus mampu mandiri dan dituntut untuk meningkatkan kemampuan keuangannya (Halim, A., & Iqbal, 2012). Kemandirian keuangan merupakan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat (Bisma & Susanto, 2010). Kemandirian keuangan desa juga dapat menimbulkan pola hubungan antara desa dengan pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat.

Terdapat empat pola hubungan situasional pemerintah desa dengan pemerintah kabupaten, provinsi dan pusat dalam melaksanakan otonomi desa yaitu instruktif, konsultatif, partisipatif, dan delegatif (Ronald *et al.*, 2010). Instruktif adalah pemerintah daerah, provinsi dan pusat memiliki masih peran yang sangat kuat terhadap kemandirian desa. Konsultatif adalah peran pemerintah daerah, provinsi dan pusat mulai berkurang dan lebih banyak memberikan konsultasi karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonomi. Kemudian partisipatif merupakan dimana daerah mendekati mampu melaksanakan otonomi. Terakhir adalah delegatif, yaitu pemerintah daerah, provinsi dan pusat sudah tidak ada campur tangan karena daerah sudah mandiri dalam menjalankan otonomi.

Perubahan keuangan setelah implementasi UU No 6 Tahun 2014 juga dapat terlihat pada kemampuan keuangan desa yaitu kemampuan desa dalam menghasilkan pendapatan desa yang dapat diukur melalui kinerja pendapatan

asli desa. Kemampuan keuangan desa dapat dihitung melalui ukuran *share* yaitu perbandingan PAD terhadap total belanja dan *growth* yaitu pertumbuhan PAD. Klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam total belanja, dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai <i>share</i> dan <i>growth</i> yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (<i>growth</i>) PAD tinggi.
III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PAD nya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja, dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD rendah

Sumber: Bisma (2010)

Tabel 1. menunjukkan bahwa kemampuan keuangan daerah yang paling baik terdapat pada kuadran I yaitu dimana hasil perbandingan PAD terhadap total belanja besar dan pertumbuhan PAD yang tinggi. Ini menyatakan bahwa daerah mampu membiayai seluruh kegiatan belanjanya dan juga mengembangkan potensi lokalnya.

Pemerintah Desa yang mampu mengelola dana desa dengan baik akan dapat meningkatkan pendapat asli desa sehingga akan menjadikan desa yang mandiri secara keuangan. Namun sebaliknya, jika pengelolaan dana desa tidak tepat maka desa akan semakin memiliki ketergantungan terhadap bantuan dana eksternal.

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pelaksanaan penggunaan dana desa masih belum efektif seperti kualitas pemerintah desa belum memadai dan minimnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan dana desa (Aziz, 2016). Kondisi rasio penggunaan anggaran juga masih belum ideal sehingga penggunaan anggaran pada bidang pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat masih sangat minim (Inten & Liliana, 2017). Keberhasilan pelaksanaan otonomi dapat ditentukan oleh dua hal yaitu pengurangan tingkat ketergantungan dan kemampuan dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi (Nadir, 2013).

Khusus untuk di Bali, belum adanya deskripsi dan pemetaan yang jelas tentang kondisi keuangan setiap desa setelah adanya Dana Desa mengakibatkan Desa lepas dari pengamatan pemerintah. Penelitian ini mengkaji fenomena dampak dana desa terkait dengan pola hubungan pemerintah desa dan juga kemampuan keuangan desa. Pentingnya mengkaji fenomena ini karena dapat memberikan deskripsi awal terkait kondisi pengelolaan keuangan desa setelah

penerapan UU Desa dan juga dapat dijadikan bahan evaluasi terhadap penggunaan dana desa.

Subyek kajian penelitian ini menggunakan desa di kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar dan Klungkung. Berdasarkan data BPS 2019, kabupaten tersebut memiliki jumlah desa yang banyak. Selain itu, desa di kabupaten tersebut memiliki karakteristik khusus dan potensi yang besar. Jembrana memiliki potensi di subsektor perkebunan Kelapa, Tabanan bidang pertanian beras, Gianyar bidang pariwisata budaya, dan Klungkung memiliki potensi pertanian hortikultura, rumput laut dan padi. Potensi tersebut dapat didukung melalui pemanfaatan dana desa yang optimal sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kuantitatif, yaitu menganalisis data dengan cara statistik deskriptif yang hanya mendeskripsikan data tanpa bermaksud melakukan generalisasi (Sugiyono, 2014). Penelitian mendeskripsikan hasil perhitungan pola hubungan dan kemampuan keuangan setiap desa sebelum dan setelah penerapan UU No. 6 Tahun 2014.

Pola hubungan desa dapat diketahui melalui analisis rasio kemandirian. Kemandirian keuangan desa ditunjukkan apabila perbandingan pendapatan asli desa lebih besar dari transfer pusat, provinsi, dan pinjaman. Kemandirian Keuangan Desa dapat dihitung menggunakan rumus sebagai berikut (Mahmudi, 2016).

$$\text{Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan asli desa}}{\text{transfer pusat, provinsi, kabupaten, pinjaman}} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Kemampuan keuangan desa adalah kemampuan dari pemerintah desa untuk dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Analisis kemampuan keuangan daerah dilakukan melalui pemetaan menggunakan metode kuadran. Metode kuadran menggunakan dua ukuran yaitu *share* dan *growth*. Adapun cara perhitungannya adalah sebagai berikut (Bisma & Susanto, 2010).

$$\text{Share} = \frac{\text{Pendapatan Asli Desa}}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

$$\text{Growth} = \frac{\text{PADes tahun } i - \text{PADes Tahun } i-1}{\text{PADes Tahun } i-1} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan:

PADes tahun i = Pendapatan Asli Desa Periode i

PADes tahun i-1= Pendapatan Asli Desa tahun sebelumnya.

Subyek penelitian adalah desa di kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar, dan Klungkung yaitu berjumlah 291 desa, sedangkan obyek yang dianalisis adalah Laporan Realisasi APBDes selama tiga tahun yaitu dari 2016 sampai 2018.

Analisis data menggunakan pendekatan kuantitatif yaitu melakukan perhitungan pola hubungan dan kemampuan keuangan desa kemudian disajikan menggunakan tabel dan grafik. Untuk mengetahui pola hubungan desa, dilakukan perhitungan analisis rasio kemandirian yaitu sesuai dengan

rumus (1) dan ditentukan pola hubungannya. Pedoman pola hubungan daerah dari sisi keuangan digambarkan sebagai berikut (Basri, 2013).

Tabel 2. Pola Hubungan Keuangan

Rasio Kemandirian	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan
≤ 25	Tidak Mampu	Instruktif
25-50	Kurang Mampu	Konsultatif
51-75	Cukup Mandiri	Partisipatif
76-100	Sudah Mandiri	Delegatif

Sumber : Basri, 2013

Kemudian, untuk pemetaan kemampuan keuangan dapat dilakukan perhitungan *share* dan *growth* sesuai dengan rumus (2) dan rumus (3). Setelah itu dihitung rata-ratanya dari 291 desa agar dapat menentukan kriteria tinggi dan rendah. Kategori *share* dan *growth* tinggi ketika nilai perhitungan desa lebih besar dari nilai rata-rata desa dan kategori rendah ketika nilai perhitungan lebih kecil dari nilai rata-rata desa. Langkah terakhir adalah melakukan pemetaan sebagai berikut (Bisma & Susanto, 2010).

Tabel 3. Peta Kemampuan Keuangan

	Rata-Rata <i>Growth</i> (%)	
Rata-Rata <i>Share</i> (%)	KUADRAN II <i>Share</i> : Rendah <i>Growth</i> : Tinggi	KUADRAN I <i>Share</i> : Tinggi <i>Growth</i> : Tinggi
	KUADRAN IV <i>Share</i> : Rendah <i>Growth</i> : Rendah	KUADRAN III <i>Share</i> : Tinggi <i>Growth</i> : Rendah

Sumber : Bisma & Susanto, 2010

Setiap desa kemudian dibuatkan grafik dan juga dipetakan ke dalam kuadran sesuai dengan hasil perhitungan *share* dan *growth*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data yang digunakan penelitian ini adalah Desa di Kabupaten Jembrana, Tabanan Gianyar dan Klungkung. Adapun rincian jumlah desa adalah sebagai berikut.

Tabel 4. Jumlah Sampel

Nomor	Keterangan	Jumlah.
1	Jumlah Desa di Bali	636
2	Selain Kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar, dan Klungkung	(345)
	Jumlah Sampel Desa	291
	Periode 2016 s.d. 2018	3 Tahun
	Total Data PADes	873

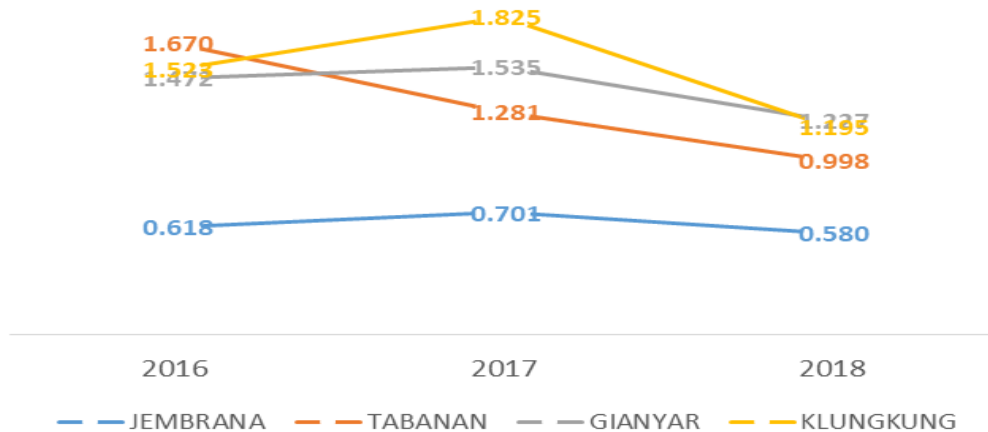
Sumber: Data Penelitian, 2019

Jumlah seluruh desa di Bali sebanyak 636 Desa. Dikarenakan hanya menggunakan sampel empat kabupaten, terdapat 345 desa yang dikeluarkan dalam penelitian sehingga desa yang dianalisis sebanyak 291 desa. Jumlah data APBDes adalah periode 2016 sampai dengan 2018 dan total data diolah sebanyak 873 APBDes.

Analisis data menggunakan dua pendekatan yaitu perhitungan pola hubungan dan kemampuan keuangan desa kemudian disajikan dalam bentuk

tabel dan grafik. Pola hubungan dihitung menggunakan rasio kemandirian yaitu perbandingan antara jumlah pendapatan asli desa dibagi dengan total pendapatan. Kemandirian desa ditunjukkan oleh besar kecilnya nilai rasio yang juga menyatakan tingkat ketergantungan desa terhadap sumber dana eksternal seperti pemerintah daerah dan pusat.

Sebelum menganalisis pola hubungan, berikut merupakan grafik kemandirian desa selama tiga tahun.



Gambar 1. Kemandirian Desa 2016 - 2018

Sumber: Data Penelitian, 2019

Gambar 1. memberikan analisis awal terkait dengan kondisi kemandirian Desa selama 2016 s.d. 2018. Dari empat kabupaten dijelaskan bahwa desa di kabupaten Jembrana memiliki kemandirian yang paling rendah dibandingkan kabupaten Tabanan, Gianyar dan Klungkung. Selama periode 3 tahun, seluruh kabupaten menunjukkan grafik kemandirian yang semakin menurun. Hal ini disebabkan Desa tidak mampu mengoptimalkan sumber pendapatannya. Peningkatan bantuan dana setiap tahun tidak disertai dengan pemanfaatan untuk meningkatkan PADes.

Kurangnya sumber pendapatan asli desa akan menyebabkan ketergantungan kepada bantuan-bantuan untuk memenuhi kebutuhannya. Tentunya hal ini tidak baik untuk jangka panjang karena pembangunan desa tidak dapat ditentukan oleh mereka sendiri. Perlu ada bantuan pihak lain sehingga pembangunan akan berjalan lambat.

Berikut dibawah ini merupakan analisis kemandirian dan pola hubungan setiap desa.

Tabel 5. Analisis Kemandirian dan Pola Hubungan Desa

Rasio Kemandirian	Tingkat Kemandirian	Pola Hubungan	Desa
≤ 25	Tidak Mampu	Instruktif	291 Desa (seluruh sampel)
25-50	Kurang Mampu	Konsultatif	0
51-75	Cukup Mandiri	Partisipatif	0
76-100	Sudah Mandiri	Delegatif	0

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan analisis perhitungan kemandirian dari 291 desa, terdapat hasil yang cukup memprihatinkan yaitu memiliki rasio kemandirian dengan nilai kurang dari 25. Hal tersebut menyatakan bahwa seluruh desa belum mampu mandiri dalam mengelola pemerintahannya. Desa masih sangat tergantung dari pendanaan pihak eksternal terutama pemerintah daerah dan pusat. Pola ini termasuk dalam kategori instruktif yaitu pemerintah daerah, provinsi dan pusat masih memiliki peran yang sangat kuat terhadap kemandirian desa.

Kondisi tersebut merupakan masalah yang harus segera diselesaikan karena akan berdampak pada lambatnya pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Kemandirian desa tidak dapat diciptakan melalui luar, namun harus dari dalam. Terdapat beberapa hal yang dapat dilaksanakan yaitu Pertama, membangun kapasitas warga dan organisasi desa yang kritis dan dinamis (Kurniawan, 2015). Masyarakat dapat mengambil tindakan ketika muncul kebijakan publik yang tidak responsif. Peran ini dapat menjadi *balancing* dalam mewujudkan program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Kedua, memperkuat kapasitas pemerintahan dan terjadi interaksi dinamis antar organisasi warga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menjalankan programnya, pemerintah desa tentunya memerlukan peran serta pihak lain seperti organisasi lain seperti BPD dan juga Karang Taruna. Pemerintah desa juga harus melaksanakan konsultasi dengan lembaga adat yang juga merupakan instrumen utama dalam desa (Rumkel *et al.*, 2019). Sinergitas harmonis tersebut akan mempercepat terlaksananya tujuan-tujuan program pemerintah desa.

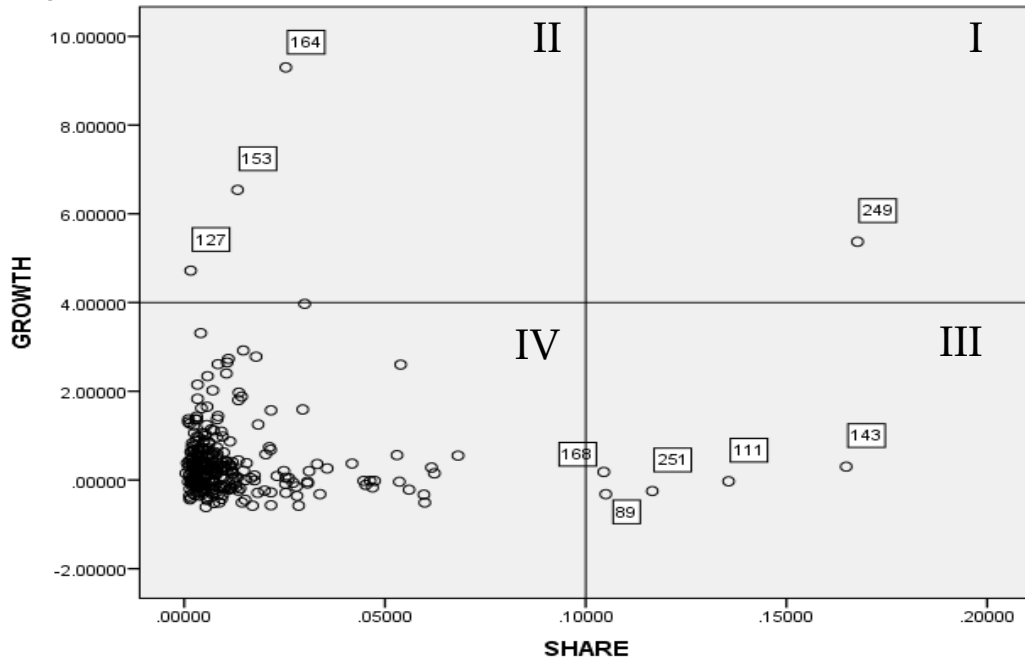
Ketiga, membangun sistem penganggaran yang responsif dan partisipatif. Mewujudkan desa yang mandiri tentunya memerlukan sistem perencanaan yang terarah dan didukung oleh partisipasi warga. Sistem yang baik adalah mampu melaksanakan pembelaan anggaran sesuai dengan fungsinya.

Keempat, membangun kelembagaan ekonomi lokal yang mandiri dan produktif. Kemandirian desa dapat terwujud ketika mampu mengelola wilayahnya secara optimal sehingga dapat meningkatkan perekonomiannya. Keberhasilan di bidang ekonomi ditentukan dari konsistensi perencanaan desa, partisipatif dan disepakati dalam dokumen perencanaan dan penganggaran desa (RPJMDesa, RKP Desa dan APB Desa).

Selain dari keempat pembahasan tersebut, keberhasilan pembangunan desa juga tidak lepas dari adanya seorang *Hero* (pejuang) yang menjadi pelopor pembangunan. Pelopor tersebut bisa dari perangkat desa, organisasi masyarakat, maupun salah satu masyarakat itu sendiri. Dengan adanya seorang pelopor, desa akan mempunyai arah tujuan dalam mewujudkan kemandirian secara ekonomi.

Perekonomian desa juga dapat diidentifikasi melalui kemampuannya dalam memenuhi kebutuhan. Pada dasarnya, kemampuan keuangan desa adalah kemampuan pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah yang berarti daerah otonom mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya (Sijabat *et al.*, 2014).

Adapun pemetaan kemampuan keuangan terhadap 291 Desa adalah sebagai berikut.



Gambar 1. Peta Kemampuan Keuangan Desa Periode 2016 - 2018

Sumber: Data Penelitian, 2019

Berdasarkan hasil analisis *Growth* dan *Share*, diperoleh satu desa berada pada kuadran I, tiga desa berada pada kuadran II, lima desa pada kuadran III dan mayoritas sisanya di kuadran IV. Kuadran I merupakan kondisi yang ideal yaitu PADes mengambil peran besar dalam total belanja, dan desa mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Kuadran ini memiliki hasil perhitungan *Growth* dan *Share* diatas rata-rata dibandingkan desa yang lain. Adapun desa yang masuk dalam kategori ini adalah desa Kampung Toyapakeh [249] yang terletak di Nusa Penida. Desa ini memiliki tingkat pertumbuhan cukup tinggi dan PADes yang tinggi selama tiga tahun terakhir.

Nusa Penida adalah salah satu kecamatan di Kabupaten Klungkung yang memiliki potensi pariwisata yang besar. Selama tiga tahun terakhir, satu desanya yaitu Toyapakeh mampu memanfaatkan keadaan tersebut sehingga dapat meningkatkan kemampuan keuangannya. Optimalnya pemanfaatan dilihat dari pertumbuhan pendapatan asli desa yang tinggi dan juga dapat mengambil peran besar dalam total belanja dibandingkan desa lain di Bali.

Kuadran II diisi oleh tiga desa yaitu Marga Dajan Puri [127], Bangli [153], dan Kebon Padangan [164]. Ketiga desa tersebut terletak di Kabupaten Tabanan. Kuadran ini dikatakan kondisi yang belum ideal, tetapi desa mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PADes berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja. Jika desa mampu mempertahankan pertumbuhan pendapatan asli desanya secara konsisten, maka nantinya dapat mengambil peran dalam total belanja. Desa tersebut akan mampu membiayai belanjanya secara mandiri.

Kuadran III merupakan kondisi dimana pendapat asli desa mengambil peran besar terhadap total belanja desa. Kondisi ini juga belum termasuk ideal karena memiliki pertumbuhan pendapatan asli desa yang kecil. Kondisi ini akan mengakibatkan desa tidak dapat mempercepat perluasan ekonominya. Jika terjadi kesalahan kebijakan, kondisi ini juga akan dapat mengurangi peran PADes terhadap belanja desa. Adapun desa yang masuk dalam kategori ini adalah Pejaten [111], Jatiluwih [143], Gubug [89], Bantiran [168], Jungutbatu [251].

Kondisi terakhir adalah berada pada kuadran IV yaitu paling buruk. Peran PADes belum mengambil peran yang besar dalam total belanja, dan desa belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PADes terhadap total belanja dan pertumbuhan PADes rendah. Kondisi ini diisi oleh hampir semua desa sehingga merupakan masalah serius yang harus segera diantisipasi. Kemampuan keuangan desa pada posisi ini merupakan penyebab mayoritas kemiskinan berada di desa. Desa tidak mampu membiayai kebutuhannya sehingga masih banyak program percepatan perekonomian yang tidak dapat dilaksanakan.

Salah satu faktor penyebab minimnya sumbangan PADes adalah tidak adanya basis ekonomi kuat yang dikelola oleh pemerintah desa. Jika kita mengkaji lebih luas, desa seharusnya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar untuk dikembangkan. Terjadi ketimpangan karena sumber daya alam yang luas ini tidak diimbangi dengan kualitas sumber daya manusianya. Hal ini berakibat banyak potensi desa yang tidak dikembangkan secara maksimal dan terjadi stagnansi perekonomian desa.

Masyarakat desa umumnya tidak menyadari potensi yang dimilikinya dan berpikiran bahwa desa mereka tidak memiliki daya tarik. Asumsi seperti itu muncul karena masyarakat masih menggunakan cara pandang sebagai penduduk yang telah sangat lama tinggal di wilayah tersebut. Mereka tidak mampu melihat menggunakan sudut pandang seperti anak perkotaan dan juga orang luar negeri yang memandang desa sebagai objek yang layak dan menarik dikelola.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa telah memberikan ruang kepada desa untuk meningkatkan perekonomiannya melalui badan usaha. Peraturan tersebut mendorong setiap desa untuk mendirikan dan mengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Tidak ada desa yang bisa sejahtera tanpa (PADes) yang tinggi dan BUMDes adalah strategi terbaik untuk meningkatkan PADes (Suryanto, 2018). Perlu adanya koordinasi dan kerjasama antar pihak desa dan BUMDes (Saputra *et al.*, 2019).

Potensi desa memiliki dimensi yang sangat luas dan tidak mungkin sama dengan wilayah lain. Kalaupun memiliki potensi hampir sama, masih tetap membutuhkan penyesuaian dengan karakter warganya. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan desa dalam mengelola potensinya yaitu pertama, memetakan bentang alam. Pemerintah desa dapat membuat peta desa dengan memberikan simbol untuk penanda setiap tempat. Landscape desa pada umumnya memiliki banyak potensi yang mudah untuk diamati seperti potensi pertanian, wisata, potensi bahan baku, potensi air dan udara bersih. Pentingnya penguatan dasar

hukum atas hak kepemilikan tanah pertanian agar para petani dapat kepastian hukum (Giles & Mu, 2018).

Kedua, memetakan bentang sosial. Peningkatan perekonomian memerlukan informasi akurat dan tepat tentang karakteristik lokal desa, termasuk sosial budaya masyarakatnya dan peluang pasar dari produk yang telah dihasilkan warga setempat. Pada dasarnya kebijakan pertumbuhan ekonomi lokal adalah terkait dengan perluasan lapangan kerja (Renkow, 2003).

Ketiga, memetakan bentang ekonomi. Semua desa memiliki potensi sumber daya yang besar namun selama ini hanya menjadi penonton dan eksploitasi pemasaran produk-produk dari kota. Seluruh kebutuhan dapat dijadikan potensi ekonomi dan selama masih ada penduduk di suatu desa, maka pasti terdapat potensi ekonomi yang dapat dikembangkan. Selain penggunaan dana desa seharusnya spesifik pada program kemiskinan, pengangguran, dan peningkatan pendidikan dan keterampilan desa (Abidin, 2015) (Heijman, W., Hagelaar, G., & van der Heide, 2019). Desa dapat mengembangkan pariwisata, *geotourism*, pertanian, dan souvenir (Farsani *et al.*, 2011) (Suriya, 2010). Pengembangan teknologi holtikultura juga dapat memaksimalkan produksi dan keuntungan (Mohyuddin *et al.*, 2013).

Keempat, memetakan bentang teknologi. sumber daya alam, manusia, dan budaya dapat dimanfaatkan secara optimal dengan adanya ide kreatif dan teknologi. Umumnya, ide kreatif dan teknologi tidak instan muncul di masyarakat pedesaan, namun harus melewati observasi dan pengalaman oleh masyarakatnya. Semakin banyak warga desa berinteraksi dengan berbagai kalangan maka pikirannya akan semakin terbuka. Warga desa yang keluar dari desa akan membawa sudut pandang dan pengalaman baru untuk desanya. Proses kreatif tidak hadir dalam ruang hampa, tetapi lewat interaksi dari banyak pihak. Perlu adanya fasilitasi jaringan internet agar dapat membentuk unit bisnis baru (Kandilov & Renkow, 2010).

Kelima, memetakan bentang manusia. Aktifitas manusia dimasyarakat memiliki potensi nilai kehidupan yang merupakan modal sosial bagi perekonomian desa. Modal sosial adalah cara masyarakat menyelesaikan masalah menggunakan jejaring, pengetahuan dan kreatifitas. Apabila masyarakat sudah terbiasa melaksanakan kegiatan kolektif dan memiliki kesadaran dan kerelaan untuk berkorban, maka dapat menjadi modal penting kesuksesan desa. Diperlukan pula investasi pada pendidikan dalam pengurangan kemiskinan agar masyarakat dapat meningkatkan pendapatan selain bidang pertanian di desa (Otsuka, 2002). Selain itu diversifikasi pekerjaan juga dapat menurunkan kemiskinan dan meningkatkan mobilitas pendapatan (Himanshu *et al.*, 2013).

Hasil penelitian ini menjelaskan kondisi desa di Bali masih dalam kondisi yang kurang optimal. Pola hubungan yang bersifat instruktif tentunya memberikan sedikit ruang untuk berkembang. Mayoritas desa juga memiliki kemampuan keuangan yang tidak baik. Sumber pendapatan asli desa belum mampu memenuhi kebutuhan pemerintah desa. Perlu adanya pendekatan khusus kepada Desa agar dapat menuju desa yang maju dan mandiri secara ekonomi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian, seluruh desa di kabupaten Jembrana, Tabanan, Gianyar dan Klungkung mendapatkan nilai rasio kemandirian kurang dari 25 point sehingga berada pada kategori pola instruktif. Hal tersebut menyatakan bahwa seluruh desa belum mampu mandiri dalam mengelola pemerintahannya. Desa masih sangat tergantung dari pendanaan pihak eksternal terutama pemerintah daerah dan pusat. Pemerintah dan masyarakat desa belum mampu mengelola potensi desa untuk menghasilkan pendapatan yang dapat meningkatkan perekonomian desa.

Berdasarkan hasil analisis *Growth* dan *Share*, diperoleh satu desa berada pada kuadran I yaitu PADes mengambil peran besar dalam total belanja, dan desa mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Terdapat tiga desa berada pada kuadran II yaitu mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal sehingga PADes berpeluang memiliki peran besar dalam total belanja. Terdapat lima desa pada kuadran III yaitu jumlah PADes dapat berkontribusi tinggi terhadap total belanja namun memiliki pertumbuhan yang kecil. Hampir seluruh desa masuk dalam kuadran IV yaitu PADes belum memiliki kontribusi terhadap total belanja dan pertumbuhannya kecil.

Hasil penelitian tersebut dapat dijadikan deskripsi awal terkait kondisi Desa setelah pemanfaatan Dana Desa. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yaitu belum mampu memperoleh data seluruh desa di Bali. Selain itu, jangka waktu penelitian terbatas mulai dari tahun 2016. Saran untuk penelitian berikutnya adalah dapat menambah jumlah analisis data yaitu seluruh desa di Bali. Selain itu, dapat juga membandingkan pola hubungan dan kemampuan keuangan sebelum dan setelah implementasi UU Desa. Analisis data dapat membandingkan mulai tahun 2011-2014 dan 2016-2018.

REFERENSI

- Abidin, M. Z. (2015). Tinjauan Atas Pelaksanaan Keuangan Desa dalam Mendukung Kebijakan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik*, 6(1), 61-76. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22212/jekp.v6i1.156>
- Aziz, N. L. L. (2016). The Village Autonomy and The Effectiveness of Village Fund. *Jurnal Politik*, 13(2), 193-211. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol27.iss53.art12>
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Berita Resmi Statistik No.15/02/Th.XX*.
- Bisma, D. G. D. E., & Susanto, H. (2010). *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003-2007*. 4(3), 75-86.
- Farsani, N. T., Coelho, C., & Costa, C. (2011). Geotourism and geoparks as novel strategies for socio-economic development in rural areas. *International Journal of Tourism Research*, 13(1), 68-81. <https://doi.org/10.1002/jtr.800>
- Giles, J., & Mu, R. (2018). Village Political Economy, Land Tenure Insecurity, and the Rural to Urban Migration Decision: Evidence from China. *American Journal of Agricultural Economics*, 100(2), 521-544. <https://doi.org/10.1093/ajae/aax086>

- Halim, A., & Iqbal, M. (2012). *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN.
- Heijman, W., Hagelaar, G., & van der Heide, M. (2019). Rural resilience as a new development concept. *EU Bioeconomy Economics and Policies*, 2, 195–211.
- Himanshu, Lanjouw, P., Murgai, R., & Stern, N. (2013). Nonfarm diversification, poverty, economic mobility, and income inequality: A case study in village India. *Agricultural Economics (United Kingdom)*, 44(4–5), 461–473. <https://doi.org/10.1111/agec.12029>
- Inten, M., & Liliana. (2017). Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 336–352. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.08.7058>
- Kandilov, I. T., & Renkow, M. (2010). Infrastructure Investment and rural economic development: An Evaluation Of USDA's broadband loan program. *Growth and Change*, 41(2), 165–191. <https://doi.org/10.1111/j.1468-2257.2010.00524.x>
- Kementerian Keuangan. (2018). *Buku II Nota Keuangan dan APBN Tahun Anggaran 2018*. <https://www.kemenkeu.go.id/media/6665/nota-keuangan-apbn-2018-rev.pdf>.
- Kurniawan, B. (2015). *Desa Mandiri Desa Membangun*. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia.
- Mahmudi. (2016). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Penerbit. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mohyuddin, A., Chaudhry, H.-U.-R., & Ambreen, M. (2013). Apple Economy of Village Zandra in Light of World System Theory. *Open Journal of Applied Sciences*, 03(01), 39–43. <https://doi.org/10.4236/ojapps.2013.31006>
- Nadir, S. (2013). Otonomi Daerah dan Desentralisasi Desa: Menuju Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Politik Profetik*, 1(1), 2013. <https://doi.org/10.24252/jpp.v1i1.1621>
- Otsuka, K. (2002). Poverty reduction issues: Village economy perspective. *Asian Development Review*, 19(1), 98–116.
- Renkow, M. (2003). Employment growth, worker mobility, and rural economic development. *American Journal of Agricultural Economics*, 85(2), 503–513. <https://doi.org/10.1111/1467-8276.00137>
- Ronald, A., Ekonomi, F., & Janabadra, U. (2010). *Analisis Kinerja Keuangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum Dan Sesudah Diberlakukannya Otonomi Daerah Di Kabupaten Kulon Progo*. I(1), 31–42.
- Rumkel, L., Sam, B., & Umanailo, M. C. B. (2019). Village head partnership, village consultative body and customary institution in village development. *International Journal of Scientific and Technology Research*, 8(8), 1058–1063.
- Saputra, K. A. K., Sara, I. M., Jayawarsa, A. A. K., & Pratama, I. G. S. (2019). Management of Village Original Income in The Perspective of Rural Economic Development. *International Journal of Advances in Social and Economics*, 1(2), 52. <https://doi.org/10.33122/ijase.v1i2.40>
- Sijabat, M. Y., Saleh, C., & Wachid, A. (2014). Analisis Kinerja Keuangan serta Kemampuan Keuangan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah (Studi pada Dinas Pendapatan Daerah dan Badan Pengelola

- Keuangan dan Aset Daerah Kota Malang Tahun Anggaran 2008-2012).
Jurnal Administrasi Publik (JAP), 2(2), 236-242.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suriya, K. (2010). Impact of community-based tourism in a village rconomy in Thailand: An analysis with VCGE model. *EcoMod2010 Conference*.
- Suryanto, R. (2018). *Peta Jalan BUMDEs Sukses*. PT. Syncore Indonesia.
- Widodo, I. (2017). Dana Desa dan Demokrasi dalam Perspektif Desentralisasi Fiskal. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 2(1), 65.
<https://doi.org/10.15294/jpi.v2i1.8487>